



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis prestasi kerja secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu adanya standar biaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah, serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran, SBM Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; dan
- b. estimasi prakiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD, dan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

SBM Tahun Anggaran 2026 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan estimasi perkiraan besaran biaya suatu aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Juli 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 24/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA MASUKAN

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
I	TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA			
A	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI			
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	Sekretaris Daerah	Orang/bulan	25.000.000
B	BERDASARKAN BEBAN KERJA			
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara	Pengawas (Sertifikasi)	Orang/bulan	1.200.000
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara	Kepala sekolah (Non Sertifikasi)	Orang/bulan	1.000.000
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara	Guru (Non Sertifikasi)	Orang/bulan	1.000.000
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara	Guru (Sertifikasi)	Orang/bulan	450.000
II	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
A	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Pembina	Orang/bulan	3.500.000
2	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Pengarah	Orang/bulan	3.000.000
3	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Ketua	Orang/bulan	2.500.000
4	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Wakil Ketua	Orang/bulan	2.000.000
5	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Sekretaris	Orang/bulan	1.500.000
6	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Anggota (7 Anggota)	Orang/bulan	1.300.000
B	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH/PENGGUNA ANGGARAN/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH/KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran s/d Rp100 Juta	Orang/bulan	1.040.000
2	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran di atas Rp100 Juta - Rp250 Juta	Orang/bulan	1.250.000
3	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran di atas Rp250 Juta - Rp500 Juta	Orang/bulan	1.450.000
4	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran di atas Rp500 Juta - Rp1 Miliar	Orang/bulan	1.660.000

1	2	3	4	5
5	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran di atas Rp1 Miliar - Rp2,5 Miliar	Orang/bulan	1.970.000
6	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran di atas Rp2,5 Miliar - Rp5 Miliar	Orang/bulan	2.280.000
7	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran di atas Rp5 Miliar - Rp10 Miliar	Orang/bulan	2.590.000
8	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran di atas Rp10 Miliar - Rp25 Miliar	Orang/bulan	3.010.000
9	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran di atas Rp25 Miliar - Rp50 Miliar	Orang/bulan	3.420.000
10	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran di atas Rp50 Miliar - Rp75 Miliar	Orang/bulan	3.840.000
11	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran di atas Rp75 Miliar - Rp100 Miliar	Orang/bulan	4.250.000
12	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran di atas Rp100 Miliar - Rp250 Miliar	Orang/bulan	4.770.000
13	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran di atas Rp250 Miliar - Rp500 Miliar	Orang/bulan	5.290.000
14	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran	Pagu Anggaran di atas Rp500 Miliar	Orang/bulan	5.810.000
<p>KETERANGAN:</p> <p>1) PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>a. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen</p> <p>c. dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen, besaran Honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen)</p> <p>2) KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>a. Dalam melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran</p> <p>b. Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah</p> <p>c. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>d. dalam hal tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran Honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen)</p>				

1	2	3	4	5
C	HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran s/d Rp100 Juta	Orang/bulan	400.000
2	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran di atas Rp100 Juta - Rp250 Juta	Orang/bulan	480.000
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran di atas Rp250 Juta - Rp500 Juta	Orang/bulan	570.000
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran di atas Rp500 Juta - Rp1 Miliar	Orang/bulan	660.000
5	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran di atas Rp1 Miliar - Rp2,5 Miliar	Orang/bulan	770.000
6	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran di atas Rp2,5 Miliar - Rp5 Miliar	Orang/bulan	880.000
7	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran di atas Rp5 Miliar - Rp10 Miliar	Orang/bulan	990.000
8	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran di atas Rp10 Miliar - Rp25 Miliar	Orang/bulan	1.250.000
9	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran di atas Rp25 Miliar - Rp50 Miliar	Orang/bulan	1.520.000
10	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran di atas Rp50 Miliar - Rp75 Miliar	Orang/bulan	1.780.000
11	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran di atas Rp75 Miliar - Rp100 Miliar	Orang/bulan	2.040.000
12	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran di atas Rp100 Miliar - Rp250 Miliar	Orang/bulan	2.440.000
13	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran di atas Rp250 Miliar - Rp500 Miliar	Orang/bulan	2.830.000
14	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran di atas Rp500 Miliar	Orang/bulan	3.230.000

1	2				3	4	5
D	HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN						
1	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran s/d Rp100 Juta	Orang/bulan	340.000
2	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran di atas Rp100 Juta - Rp250 Juta	Orang/bulan	420.000
3	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran di atas Rp250 Juta - Rp500 Juta	Orang/bulan	500.000
4	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran di atas Rp500 Juta - Rp1 Miliar	Orang/bulan	570.000
5	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran di atas Rp1 Miliar - Rp2,5 Miliar	Orang/bulan	670.000
6	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran di atas Rp2,5 Miliar - Rp5 Miliar	Orang/bulan	770.000
7	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran di atas Rp5 Miliar - Rp10 Miliar	Orang/bulan	860.000
8	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran di atas Rp10 Miliar - Rp25 Miliar	Orang/bulan	1.090.000
9	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran di atas Rp25 Miliar - Rp50 Miliar	Orang/bulan	1.320.000
10	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran di atas Rp50 Miliar - Rp75 Miliar	Orang/bulan	1.550.000
11	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran di atas Rp75 Miliar - Rp100 Miliar	Orang/bulan	1.780.000
12	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran di atas Rp100 Miliar - Rp250 Miliar	Orang/bulan	2.120.000
13	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran di atas Rp250 Miliar - Rp500 Miliar	Orang/bulan	2.470.000
14	Bendahara Penerimaan	Pengeluaran	atau	Bendahara	Pagu Anggaran di atas Rp500 Miliar	Orang/bulan	2.810.000
E	HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PENERIMAAN PEMBANTU						
1	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pengeluaran Pembantu	atau	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran s/d Rp100 Juta	Orang/bulan	260.000
2	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pengeluaran Pembantu	atau	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran di atas Rp100 Juta - Rp250 Juta	Orang/bulan	310.000
3	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pengeluaran Pembantu	atau	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran di atas Rp250 Juta - Rp500 Juta	Orang/bulan	370.000
4	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pengeluaran Pembantu	atau	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran di atas Rp500 Juta - Rp1 Miliar	Orang/bulan	430.000
5	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pengeluaran Pembantu	atau	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran di atas Rp1 Miliar - Rp2,5 Miliar	Orang/bulan	500.000
6	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pengeluaran Pembantu	atau	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran di atas Rp2,5 Miliar - Rp5 Miliar	Orang/bulan	570.000
7	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pengeluaran Pembantu	atau	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran di atas Rp5 Miliar - Rp10 Miliar	Orang/bulan	640.000

1	2	3	4	5
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran di atas Rp10 Miliar - Rp25 Miliar	Orang/bulan	810.000
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran di atas Rp25 Miliar - Rp50 Miliar	Orang/bulan	980.000
10	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran di atas Rp50 Miliar - Rp75 Miliar	Orang/bulan	1.150.000
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran di atas Rp75 Miliar - Rp100 Miliar	Orang/bulan	1.330.000
12	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran di atas Rp100 Miliar - Rp250 Miliar	Orang/bulan	1.580.000
13	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran di atas Rp250 Miliar - Rp500 Miliar	Orang/bulan	1.840.000
14	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Pagu Anggaran di atas Rp500 Miliar	Orang/bulan	2.090.000
F	HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN			
1	Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	Pagu Anggaran/d Rp 100 juta	Orang/bulan	300.000
2	Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	Pagu Anggaran di atas Rp100 jt s.d Rp250 jt	Orang/bulan	350.000
3	Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	Pagu Anggaran di atas 250 jt s.d 500 jt	Orang/bulan	400.000
4	Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	Pagu Anggaran di atas Rp 500 jt s.d Rp 1 M	Orang/bulan	450.000
5	Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	Pagu Anggaran di atas Rp1 M	Orang/bulan	500.000
G	HONORARIUM BENDAHARA GAJI			
1	Pembantu Bendahara Khusus Gaji	Perangkat Daerah	Orang/bulan	300.000
2	Pembantu Bendahara Khusus Gaji	Khusus Dinas Kesehatan dan KB, Dinas Pendidikan, Bagian Umum, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan	Orang/bulan	400.000
H	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH			
1	Pengurus Barang Milik Daerah	Pengurus Barang Pengelola	Orang/bulan	500.000
2	Pengurus Barang Milik Daerah	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang/bulan	450.000
3	Pengurus Barang Milik Daerah	Pengurus Barang Pengguna	Orang/bulan	400.000
4	Pengurus Barang Milik Daerah	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/bulan	350.000
5	Pengurus Barang Milik Daerah	Pengurus Barang Pembantu	Orang/bulan	300.000

1	2	3	4	5
I	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA			
1	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
a	Honorarium Pejabat Pengadaan barang/Jasa		Orang/kegiatan	680.000
2	PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA			
a	Kepala		Orang/bulan	1.000.000
b	Sekretaris/Staf Pendukung		Orang/bulan	750.000
3	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI			
a	Kelompok kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi	Rp. 200 Jt - Rp. 500 Jt		
	1. Ketua		Orang/paket	850.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	800.000
	3. Anggota		Orang/paket	800.000
b	Kelompok kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi	di atas Rp. 500 Jt - Rp. 1 M		
	1. Ketua		Orang/paket	1.000.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	950.000
	3. Anggota		Orang/paket	950.000
c	Kelompok kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi	di atas Rp. 1 M - Rp. 2.5 M		
	1. Ketua		Orang/paket	1.250.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	1.200.000
	3. Anggota		Orang/paket	1.200.000
d	Kelompok kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi	di atas Rp. 2.5 M - Rp. 5 M		
	1. Ketua		Orang/paket	1.500.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	1.450.000
	3. Anggota		Orang/paket	1.450.000
e	Kelompok kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi	di atas Rp. 5 M - Rp. 10 M		
	1. Ketua		Orang/paket	1.750.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	1.700.000
	3. Anggota		Orang/paket	1.700.000
f	Kelompok kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi	di atas Rp. 10 M - Rp. 25 M		
	1. Ketua		Orang/paket	2.100.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	2.050.000
	3. Anggota		Orang/paket	2.050.000

1	2	3	4	5
g	Kelompok kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi	di atas Rp. 25 M - Rp. 50 M		
	1. Ketua		Orang/paket	2.450.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	2.400.000
	3. Anggota		Orang/paket	2.400.000
h	Kelompok kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi	di atas Rp. 50 M - Rp. 75 M		
	1. Ketua		Orang/paket	2.750.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	2.700.000
	3. Anggota		Orang/paket	2.700.000
i	Kelompok kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi	di atas Rp. 75 M - Rp. 100 M		
	1. Ketua		Orang/paket	3.100.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	3.050.000
	3. Anggota		Orang/paket	3.050.000
4	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENGADAAN BARANG (NONKONSTRUKSI)			
a	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang	di atas Rp. 200 Jt - Rp. 500 Jt		
	1. Ketua		Orang/paket	750.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	700.000
	3. Anggota		Orang/paket	700.000
b	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang	di atas Rp. 500 Jt - Rp. 1M		
	1. Ketua		Orang/paket	900.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	850.000
	3. Anggota		Orang/paket	850.000
c	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang	di atas Rp. 1M - Rp. 2.5M		
	1. Ketua		Orang/paket	1.100.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	1.050.000
	3. Anggota		Orang/paket	1.050.000
d	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang	di atas Rp. 2.5M - Rp. 5M		
	1. Ketua		Orang/paket	1.350.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	1.300.000
	3. Anggota		Orang/paket	1.300.000
e	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang	di atas Rp. 5 M - Rp. 10 M		
	1. Ketua		Orang/paket	1.600.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	1.550.000
	3. Anggota		Orang/paket	1.550.000

1	2	3	4	5
f	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang	di atas Rp. 10 M - Rp. 25 M		
	1. Ketua		Orang/paket	1.900.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	1.850.000
	3. Anggota		Orang/paket	1.850.000
g	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang	di atas Rp.25 M - Rp. 50 M		
	1. Ketua		Orang/paket	2.200.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	2.150.000
	3. Anggota		Orang/paket	2.150.000
h	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang	di atas Rp. 50 M - Rp. 75 M		
	1. Ketua		Orang/paket	2.500.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	2.450.000
	3. Anggota		Orang/paket	2.450.000
i	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang	di atas Rp. 75 M - Rp. 100 M		
	1. Ketua		Orang/paket	2.800.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	2.750.000
	3. Anggota		Orang/paket	2.750.000
5	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA (NONKONSTRUKSI)			
a	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Pagu Anggaran Rp. 100 Jt - Rp. 250 Jt		
	1. Ketua		Orang/paket	450.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	400.000
	3. Anggota		Orang/paket	400.000
b	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Pagu Anggaran di atas Rp. 250 Jt - Rp 500 Jt		
	1. Ketua		Orang/paket	600.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	550.000
	3. Anggota		Orang/paket	550.000
c	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Pagu Anggaran di atas Rp. 500 Jt - Rp. 1 M		
	1. Ketua		Orang/paket	700.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	650.000
	3. Anggota		Orang/paket	650.000

1	2	3	4	5
d	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Pagu Anggaran di atas Rp. 1 M - Rp. 2.5 M		
	1. Ketua		Orang/paket	900.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	850.000
	3. Anggota		Orang/paket	850.000
e	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Pagu Anggaran di atas Rp. 2.5 M - Rp. 5 M		
	1. Ketua		Orang/paket	1.000.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	950.000
	3. Anggota		Orang/paket	950.000
f	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Pagu Anggaran di atas Rp. 5 M - Rp. 10 M		
	1. Ketua		Orang/paket	1.250.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	1.200.000
	3. Anggota		Orang/paket	1.200.000
g	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Pagu Anggaran di atas Rp. 10 M - Rp. 25 M		
	1. Ketua		Orang/paket	1.500.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	1.450.000
	3. Anggota		Orang/paket	1.450.000
h	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Pagu Anggaran di atas Rp. 25 M - Rp. 50 M		
	1. Ketua		Orang/paket	1.750.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	1.700.000
	3. Anggota		Orang/paket	1.700.000
i	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Pagu Anggaran di atas Rp. 50 M - Rp. 75 M		
	1. Ketua		Orang/paket	1.950.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	1.900.000
	3. Anggota		Orang/paket	1.900.000
j	Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Pagu Anggaran di atas Rp. 75 M - Rp. 100 M		
	1. Ketua		Orang/paket	2.200.000
	2. Sekretaris		Orang/paket	2.150.000
	3. Anggota		Orang/paket	2.150.000

1	2	3	4	5
6	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa Lainnya			
a	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa Lainnya	Pagu Anggaran di atas Rp25 Juta - Rp50 Juta	Orang/paket	250.000
b	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa Lainnya	Pagu Anggaran di atas Rp50 Juta - Rp100 Juta	Orang/paket	300.000
c	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa Lainnya	Pagu Anggaran Rp100 Juta - Rp200 Juta	Orang/paket	350.000
7	Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi			
a	Pengadaan Jasa Konsultansi	Pagu Anggaran di atas Rp25 Juta - Rp50 Juta	Orang/paket	250.000
b	Pengadaan Jasa Konsultansi	Pagu Anggaran di atas Rp50 Juta - Rp100 Juta	Orang/paket	350.000
8	Pengadaan Barang Khusus <i>E- Purchasing</i>			
a	Pengadaan Barang Khusus <i>E-Purchasing</i>	Pagu Anggaran di atas Rp25 Juta - Rp50 Juta	Orang/paket	250.000
b	Pengadaan Barang Khusus <i>E-Purchasing</i>	Pagu Anggaran di atas Rp50 Juta - Rp100 Juta	Orang/paket	300.000
c	Pengadaan Barang Khusus <i>E-Purchasing</i>	Pagu Anggaran di atas Rp100 Juta - Rp200 Juta	Orang/paket	350.000
J	HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
1	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pagu Anggaran s/d Rp100 Juta	Orang/Kegiatan	1.010.000
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pagu Anggaran di atas Rp100 Juta - Rp250 Juta	Orang/Kegiatan	1.210.000
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pagu Anggaran di atas Rp250 Juta - Rp500 Juta	Orang/Kegiatan	1.410.000
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pagu Anggaran di atas Rp500 Juta - Rp1 Miliar	Orang/Kegiatan	1.610.000
5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pagu Anggaran di atas Rp1 Miliar - Rp2,5 Miliar	Orang/Kegiatan	1.910.000
6	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pagu Anggaran di atas Rp2,5 Miliar - Rp5 Miliar	Orang/Kegiatan	2.210.000
7	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pagu Anggaran di atas Rp5 Miliar - Rp10 Miliar	Orang/Kegiatan	2.520.000
8	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pagu Anggaran di atas Rp10 Miliar - Rp25 Miliar	Orang/Kegiatan	2.920.000
9	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pagu Anggaran di atas Rp25 Miliar - Rp50 Miliar	Orang/Kegiatan	3.320.000

1	2	3	4	5
10	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pagu Anggaran di atas Rp50 Miliar - Rp75 Miliar	Orang/Kegiatan	3.720.000
11	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pagu Anggaran di atas Rp75 Miliar - Rp100 Miliar	Orang/Kegiatan	4.130.000
III	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
A	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH			
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	Pengarah	Orang/bulan	1.500.000
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	Penanggung Jawab	Orang/bulan	1.250.000
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	Ketua	Orang/bulan	1.000.000
4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	Wakil Ketua	Orang/bulan	850.000
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	Sekretaris	Orang/bulan	750.000
6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	Anggota	Orang/bulan	750.000
B	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH			
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Pengarah	Orang/bulan	750.000
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Orang/bulan	700.000
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Ketua	Orang/bulan	650.000
4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	Orang/bulan	600.000
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Sekretaris	Orang/bulan	500.000
6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Anggota	Orang/bulan	500.000

1	2	3	4	5
C	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Pengarah	Orang/bulan	500.000
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Penanggung Jawab	Orang/bulan	450.000
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Ketua	Orang/bulan	400.000
4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Wakil Ketua	Orang/bulan	350.000
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Sekretaris	Orang/bulan	300.000
6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Anggota	Orang/bulan	300.000
D	HONORARIUM PENYUSUN MATERI			
1	Honorarium Penyusun Materi (Non Aparatur Sipil Negara) s/d 50 Halaman	Honorarium Penyusun Materi/Naskah dalam Bentuk <i>Script Writer</i> untuk Kegiatan Pentas Drama (atau Sejenisnya).	Orang/kegiatan	200.000
2	Honorarium Penyusun Materi (Non Aparatur Sipil Negara) 51 s/d 100 Halaman	Honorarium Penyusun Materi/Naskah dalam Bentuk <i>Script Writer</i> untuk Kegiatan Pentas Drama (atau Sejenisnya).	Orang/kegiatan	500.000
3	Honorarium Penyusun Materi (Non Aparatur Sipil Negara) 101 Halaman Lebih	Honorarium Penyusun Materi/Naskah dalam Bentuk <i>Script Writer</i> untuk Kegiatan Pentas Drama (atau Sejenisnya).	Orang/kegiatan	750.000
E	HONORARIUM BANTUAN HUKUM LITIGASI			
1	Perkara Hukum Pidana			
a	Honorarium Tahap Penyidikan	Tahap Penyidikan	Per Kegiatan	2.000.000
b	Honorarium Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000
c	Honorarium Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000
d	Honorarium Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000
e	Honorarium Tahap Peninjauan Kembali	Tahap Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000

1	2	3	4	5
2	Perkara Hukum Perdata			
a	Honorarium Perkara Perdata	Tahap Gugatan	Per Kegiatan	2.000.000
b	Honorarium Perkara Perdata	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000
c	Honorarium Perkara Perdata	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000
d	Honorarium Perkara Perdata	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000
e	Honorarium Perkara Perdata	Tahap Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000
3	Perkara Hukum Tata Usaha Negara			
a	Honorarium Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Tahap Pemeriksaan Pendahuluan	Per Kegiatan	2.000.000
b	Honorarium Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000
c	Honorarium Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000
d	Honorarium Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000
e	Honorarium Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Tahap Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000
4	Bantuan Hukum			
a	Honorarium Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000
b	Honorarium Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Tahap Penyidikan	Per Kegiatan	2.000.000
5	Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara			
a.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Pejabat Eselon II ke bawah/yang disetarakan	orang/kali	4.000.000
b.	Honorarium Beracara		orang/kali	1.000.000
F	HONORARIUM NARASUMBER			
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	-	Orang/jam	1.700.000
2	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lain yang disetarakan	-	Orang/jam	1.400.000
3	Pejabat eselon I/yang disetarakan	-	Orang/jam	1.200.000
4	Pejabat eselon II/yang disetarakan	-	Orang/jam	1.000.000
5	Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	-	Orang/jam	900.000

1	2	3	4	5
G	BELANJA JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) PARUH WAKTU			
1	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Paruh Waktu	Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Sederajat	Orang/bulan	2.600.000
2	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Paruh Waktu	Jenjang Sekolah menengah Pertama (SMP)/Sederajat	Orang/bulan	2.650.000
3	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Paruh Waktu	Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat	Orang/bulan	2.700.000
4	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Paruh Waktu	Jenjang Sarjana (S1)/Sederajat	Orang/bulan	2.750.000
H	JASA TENAGA LABORATORIUM			
1	Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa pengambilan spesimen [DAK]	Sampel	25.000
2	Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa pengepakan/ pengemasan spesimen [DAK]	Sampel	25.000
3	Jasa Tenaga Laboratorium	Difteri (Kultur & Tes Toksinegintas) [DAK]	Sampel	385.000
4	Jasa Tenaga Laboratorium	Paket Keracunan Makanan Mikrobiologi Sanitasi [DAK]	Sampel	450.000
5	Jasa Tenaga Laboratorium	Paket Keracunan Makanan Kimia Fisika (Makanan) [DAK]	Sampel	570.000
6	Jasa Tenaga Laboratorium	Campak (IgM Measless & Rubella) [DAK]	Sampel	600.000
7	Jasa Tenaga Laboratorium	uji laboratorium narkoba	Orang/Paket	600.000
8	Jasa Tenaga Laboratorium	Paket Keracunan Makanan Kimia Fisika (Air) [DAK]	Sampel	720.000
9	Jasa Tenaga Laboratorium	AFP (Kultur Virus Polio) [DAK]	Sampel	1.000.000
10	Jasa Tenaga Laboratorium	Campak (Measless & Rubella PCR) [DAK]	Sampel	1.250.000
11	Jasa Tenaga Laboratorium	Air Badan Air/Air Sungai	Titik	1.664.000
12	Jasa Tenaga Laboratorium	Air Bawah Tanah/Air Bersih	Titik	1.150.000
13	Jasa Tenaga Laboratorium	Air Embung	Titik	847.000
14	Jasa Tenaga Laboratorium	Air Hujan	Titik	777.000
15	Jasa Tenaga Laboratorium	Air Limbah Domestik	Titik	943.000
16	Jasa Tenaga Laboratorium	Air Limbah Industri Gula	Titik	308.000
17	Jasa Tenaga Laboratorium	Air Limbah Industri Kedelai	Titik	162.000
18	Jasa Tenaga Laboratorium	Air Limbah Puskesmas	Titik	943.000
19	Jasa Tenaga Laboratorium	Air Limbah Rumah Sakit	Titik	943.000
20	Jasa Tenaga Laboratorium	Air Lindi	Titik	777.000
21	Jasa Tenaga Laboratorium	Udara Ambien Metode Impinger	Titik	3.529.000
22	Jasa Tenaga Laboratorium	Udara Ambien Metode Passive Sampler	Titik	3.706.000
23	Jasa Tenaga Laboratorium	Udara Emisi Cerobong	Titik	2.052.000
24	Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Laboratorium Kain	Kali	2.500.000
25	Jasa Tenaga Laboratorium	spesimen	Tes	75.000
I	JASA TENAGA AHLI			
1	Jasa Tenaga Ahli	Programmer; Termasuk Programmer dan Desainer Database (Structure Query Language/SQL, Relational Database Management System/RDBMS)	Orang/Bulan	7.500.000
2	Jasa Tenaga Ahli	Pendamping dan Fasilitator Jemaah Haji (Petugas Haji Daerah)	Orang/kegiatan	50.000.000
J	JASA TENAGA ADMINISTRASI			
1	Jasa Tenaga Administrasi	Upah Entry Data	Orang / Responden	1.500
2	Jasa Tenaga Administrasi	Upah Surveyor	Orang / Responden	5.500
3	Jasa Tenaga Administrasi	Harian	Orang/Hari	100.000
4	Jasa Tenaga Administrasi	Pelanayanan Umum	Orang/Acara	100.000
5	Jasa Tenaga Administrasi	Upah Tim Monev Pendataan	Orang/Kegiatan	600.000
6	Jasa Tenaga Administrasi	Pendampingan oleh Kader TPK	Orang/Kegiatan	120.000
7	Jasa Tenaga Administrasi	Biaya Operasional Kader TPK (BOKB)	Orang/Kegiatan	170.000

1	2	3	4	5
K	JASA TENAGA PELAYANAN UMUM			
1	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Upah Kader Kesehatan	Rupiah	75.900
2	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jasa Tenaga umum Lainnya	Orang/kegiatan	300.000
3	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	(BOKB)Paket prosedur pada tuba fallopi (Jasa medis, BMHP, APD, Pemeriksaan Penunjang)	Paket	2.803.500
4	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Biaya Pemeriksaan Sampel SG6PD	Per Sampel	65.400
5	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Biaya Pemeriksaan Sampel SHAK	Per Sampel	52.600
6	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Biaya Pemeriksaan Sampel SHK	Per Sampel	59.500
7	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jasa Cleaning Service, Laundry Dan Perawatan Sarpras Lainnya	Paket	75.000
8	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Pemeriksaan Kesehatan	Orang/Kali	1.600.000
L	BELANJA JASA TENAGA ALIH DAYA			
1	Belanja Jasa Tenaga Alih Daya	Outsourcing	Orang/bulan	2.500.000
M	JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN			
1	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Electone dan Penyanyi	Paket	1.300.000
2	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Grup Musik/ Band	Paket	5.000.000
3	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Grup Hiburan	Paket	5.000.000
N	JASA KONTRIBUSI ASOSIASI			
1	Jasa Kontribusi Asosiasi	Iuran ASDEKSI Nasional	Paket/Tahun	2.000.000
2	Jasa Kontribusi Asosiasi	Kontribusi Kegiatan ASDEKSI	Paket/Tahun	5.500.000
3	Jasa Kontribusi Asosiasi	kontribusi asosiasi sekda	Paket/Tahun	10.000.000
4	Jasa Kontribusi Asosiasi	Iuran ADEKSI (DPRD)	Paket/Tahun	20.000.000
O	KURSUS SINGKAT/PELATIHAN			
1	Kursus Singkat/Pelatihan	Pelatihan/ Kursus TI	Orang/Paket	4.000.000
2	Kursus Singkat/Pelatihan	Paket All in di Balai Besar Pelatihan Peternakan	Orang/Paket	4.300.000
3	Kursus Singkat/Pelatihan	Belanja Kontribusi Assessment	Orang/Kegiatan	5.000.000
4	Kursus Singkat/Pelatihan	Kontribusi Diklat Fungsional	Orang/Kegiatan	10.000.000
5	Kursus Singkat/Pelatihan	Kontribusi Diklat Teknis	Orang/Kegiatan	10.000.000
6	Kursus Singkat/Pelatihan	Kontribusi Diklat Manajerial	Orang/Kegiatan	20.000.000
7	Kursus Singkat/Pelatihan	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Satpol PP	Orang/Kegiatan	25.000.000
P	BEASISWA TUGAS BELAJAR			
1	Beasiswa Tugas Belajar	Beasiswa Tugas Belajar Strata 1	Orang	7.500.000
2	Beasiswa Tugas Belajar	Beasiswa Tugas Belajar Strata 2	Orang	15.000.000
3	Beasiswa Tugas Belajar	Beasiswa Tugas Belajar Strata 3	Orang	100.000.000
Q	UANG YANG DIBERIKAN KEPADA RT/RW/LPM			
1	Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	Ketua RT	Orang	1.200.000
2	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	Ketua RW	Orang	1.200.000
3	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Ketua LPMK	Orang	1.200.000

1	2	3	4	5
IV	MAKAN MINUM DAN UANG LEMBUR			
A	BELANJA MAKAN DAN MINUM LEMBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA		Orang/hari	36.000
	Catatan :			
	1. Belanja Makan dan Minuman Lembur diberikan 2 jam setelah waktu normal jam kerja dan dapat diberikan 4 jam berikutnya, pada hari kerja efektif, paling banyak 2 kali sehari.			
	2. Untuk hari libur diberikan tiap 4 jam, paling banyak 2 kali sehari			
	3. Makan dan Minuman Lembur diberikan dalam bentuk makanan dan minuman, sesuai dengan surat perintah lembur dan tidak diperkenankan dalam bentuk uang			
B	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (GURU) DAN PPPK PARUH WAKTU			
1	Hari Kerja			
a	Guru	2 jam pertama	Orang/jam	13.000
b	Guru	2 jam kedua	Orang/jam	26.000
c	Guru	2 jam ketiga	Orang/jam	52.000
2	Hari Libur			
	Guru		Orang/jam	26.000
	Catatan :			
	1. Uang lembur sudah termasuk uang makan lembur.			
	2. Uang lembur diberikan paling banyak 6 jam dalam 1 hari.			
3	PPPK Paruh Waktu		Orang/hari	26.000
	Khusus uang lembur bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dapat diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari belanja jasa yang diterima			
VI	HADIAH PERLOMBAAN			
A	HADIAH PERLOMBAAN TINGKAT NASIONAL			
1	Juara Lomba Tingkat Nasional	Juara I	Orang/Group	25.000.000
2	Juara Lomba Tingkat Nasional	Juara II	Orang/Group	23.000.000
3	Juara Lomba Tingkat Nasional	Juara III	Orang/Group	20.000.000
4	Juara Lomba Tingkat Nasional	Juara Harapan I	Orang/Group	15.000.000
5	Juara Lomba Tingkat Nasional	Juara Harapan II	Orang/Group	12.000.000
6	Juara Lomba Tingkat Nasional	Juara Harapan III	Orang/Group	10.000.000

1	2	3	4	5
B	HADIAH PERLOMBAAN TINGKAT PROPINSI			
1	Juara Lomba Tingkat Propinsi	Juara I	Orang/Group	23.000.000
2	Juara Lomba Tingkat Propinsi	Juara II	Orang/Group	20.000.000
3	Juara Lomba Tingkat Propinsi	Juara III	Orang/Group	18.000.000
4	Juara Lomba Tingkat Propinsi	Juara Harapan I	Orang/Group	15.000.000
5	Juara Lomba Tingkat Propinsi	Juara Harapan II	Orang/Group	12.000.000
6	Juara Lomba Tingkat Propinsi	Juara Harapan III	Orang/Group	10.000.000
C	HADIAH PERLOMBAAN TINGKAT KOTA			
1	Juara Lomba Tingkat Kota	Juara I	Orang/Group	20.000.000
2	Juara Lomba Tingkat Kota	Juara II	Orang/Group	18.000.000
3	Juara Lomba Tingkat Kota	Juara III	Orang/Group	15.000.000
4	Juara Lomba Tingkat Kota	Juara Harapan I	Orang/Group	10.000.000
5	Juara Lomba Tingkat Kota	Juara Harapan II	Orang/Group	8.000.000
6	Juara Lomba Tingkat Kota	Juara Harapan III	Orang/Group	5.000.000
D	HADIAH PERLOMBAAN TINGKAT KECAMATAN/KELURAHAN			
1	Juara Lomba Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Juara I	Orang/Group	15.000.000
2	Juara Lomba Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Juara II	Orang/Group	13.000.000
3	Juara Lomba Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Juara III	Orang/Group	10.000.000
4	Juara Lomba Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Juara Harapan I	Orang/Group	8.000.000
5	Juara Lomba Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Juara Harapan II	Orang/Group	5.000.000
6	Juara Lomba Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Juara Harapan III	Orang/Group	2.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI